

BAGIAN 4

PERKEMBANGAN

KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA

4.1 Latar Belakang kehidupan Masyarakat

Semenjak jaman kejayaan kerajaan-kerajaan di Indonesia, masyarakat mengabdikan pada kepentingan keraton dan selalu hidup menerima apa adanya. Kekuasaan-kekuasaan di daerah diserahkan kepada para bupati dan ponggawanya, mereka memungut hasil bumi dari masyarakat, hal ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama sampai datangnya VOC ke Indonesia. VOC pada mulanya datang hanya untuk berdagang saja, tetapi dengan pengaruh dan kelicikannya, VOC dapat menguasai perdagangan rempah-rempah dari Indonesia yang dibutuhkan di Eropa. Pada akhirnya VOC dapat menggantikan kekuasaan bupati sebagai penguasa daerah dalam memungut dan membeli hasil bumi dari masyarakat. Akhirnya VOC tidak dapat bertahan lama di Indonesia karena mengalami kebangkrutan, sehingga untuk mengatasi hal ini Pemerintah Belanda menggantikan peranan VOC di Indonesia dengan mengutus dan menempatkan seorang Gubernur Jendral yang sekaligus menjadi pemerintahan Belanda di Indonesia. Keadaan ini berakibat terjadinya perubahan-perubahan struktur kekuasaan daerah, di mana kekuasaan politik dan pemerintahan yang pada mulanya penuh di tangan bupati sebagai bagian dari sistem kerajaan, kemudian berubah di mana bupati harus bertanggung jawab kepada seorang Residen, yang dipilih dari orang Belanda. Begitu pula, bupati dan bawahannya berubah status menjadi pegawai pemerintahan sipil pribumi Hindia Belanda dengan sebutan *priyayi* atau *pangreh praja*. Kekuasaan pemerintahan sipil pribumi diperkuat oleh *Regeerings Reglement* atau *peraturan pemerintahan* tahun 1854. Kedudukan pangreh praja telah dirumuskan dalam pasal 67 dan pasal 69, yang menegaskan bahwa :

Sejauh keadaan mengijinkan, penduduk pribumi hendaklah dibiarkan berada di bawah pemimpin-pemimpin mereka sendiri, baik yang diangkat maupun yang diakui oleh Pemerintah, yang tunduk kepada semacam supervisi yang lebih tinggi yang akan ditetapkan dengan peraturan umum atau khusus dari gubernur jenderal.

Pada masa ini terjadi perubahan pengelompokan masyarakat yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu golongan masyarakat biasa (umumnya petani) dan golongan priyayi. Kedua golongan tersebut mempunyai tujuan hidup dalam rangka mempertahankan diri melalui keuletan. Golongan petani mempunyai tujuan hidup (motivasi) yang dinyatakan dalam ajaran-ajaran yang berkisar pada produksi maupun reproduksi, baik mengenai manusia sendiri maupun pada hasil lahan pertanian, mereka mempunyai pandangan bahwa masyarakat petani bersifat sederhana, kongkrit, dan berpijak pada bumi. Sedangkan golongan priyayi mempunyai motivasi hidup yang dinyatakan dalam upacara-upacara yang rumit dan

muluk. Untuk lebih jelasnya perkembangan masyarakat Indonesia di uraikan berikut ini terutama pada masyarakat priyayi dan masyarakat lainnya di luar petani, terutama mereka yang berada di perkotaan saat itu, sebagai berikut :

4.1.1 *Perkembangan Kelompok Birokrat di masa Pemerintahan Kolonial*

Budaya kelompok priyayi atau birokrat tradisional bersumber dari budaya keraton Hindu kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa yang berada di pedalaman. Setelah pemerintahan Hindia Belanda menguasai perekonomian dan politik, maka mulai mengambil alih kedaulatan kerajaan-kerajaan tersebut pada abad XVII atau XVIII, di mana para pegawai berangsur-angsur beralih menjadi pegawai pemerintah Hindia Belanda. Dalam melaksanakan pemerintahannya, Belanda menerapkan *sesama di atas sesama* yang artinya Belanda memerintah rakyat melalui tangan perantara, yaitu melalui golongan birokrat Jawa yang disebut *priyayi*. "Priyayi" muncul pada jaman penjajahan Belanda sebagai sebutan terhadap terhadap kaum bangsawan atau pegawai pemerintahan Hindia-Belanda yang telah memperoleh pendidikan untuk mengabdikan atau menjadi pegawai. Istilah priyayi sebenarnya berasal dari kata *para-yayi* yang artinya *adik-adik raja*, tetapi perkembangannya mengalami perubahan sesuai dengan stratifikasi sosial yang berlaku saat itu. Golongan ini sekaligus mewakili golongan kelompok bangsawan terpelajar, yang bersifat kota (memiliki sistem nilai budaya kota), mereka tidak memiliki lahan pertanian tetapi tergantung kepada sistem gaji yang diberikan Pemerintah Hindia Belanda.

Perkembangan priyayi sebagai pegawai pemerintahan sipil pribumi yang bertanggung jawab terhadap pemerintahan kolonial Hindia-Belanda mendapat gelar kepegawaian yang mengesankan, yaitu **Pangreh Praja** artinya *penguasa kerajaan*. Gelar tersebut memiliki kebanggaan bagi pemakainya, tetapi oleh Belanda dipandang sebagai "*pemerintahan pribumi*", yang berada di bawah Pemerintahan Kolonial. Pejabat-pejabat pribumi sebagai pangreh praja merupakan suatu kelas penguasa yang dikagumi dan sekaligus ditakuti oleh masyarakat umum. Mereka merupakan wakil-wakil bawahan dari sebuah kekuasaan asing. Dengan demikian, pemerintahan Hindia-Belanda tidak mengubah tata cara kehidupan keraton melainkan melanjutkan dan memasukkannya ke dalam administrasi pemerintahan kolonial. Sedangkan yang berubah adalah hak dan sistem pemerintahan. Akibatnya kekuasaan keraton terhadap rakyat dan wilayahnya menjadi berkurang, bahkan dihilangkan. Begitu pula, hubungan kawula-gusti diperlemah, bahkan ditiadakan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kekuasaan Belanda di Indonesia.

Secara keseluruhan sistem budaya golongan birokrat atau priyayi itu menyimak kebudayaan keraton Yogyakarta atau keraton Surakarta. Sedangkan orientasi ideal golongan birokrat adalah *kedudukan*, dan ekspresi perilakunya adalah :

- kehalusan perilaku
- pengendalian diri
- terlalu sopan

- mistis
- seni budaya unggulannya adalah tari

Penyebaran ciri-ciri tersebut menembus seluruh hierarki masyarakat Jawa, perbedaannya hanyalah pada setiap aspek dan struktur kehidupan masyarakat. Golongan priyayi ini mengalami perkembangan, apalagi setelah putra-putri mereka mendapatkan sistem pendidikan Belanda. Kehidupan priyayi ini merupakan feodalisme semu yang dipelihara Belanda, tetapi pengaruhnya berangsur-angsur menurun setelah banyaknya bangsa Indonesia yang berpendidikan. Adapun perkembangan golongan priyayi dan kelompok pegawai yang lebih rasional sebagai berikut :

1) ***Ciri hubungan sosial kelompok birokrat***

Hubungan kaum birokrat dengan atasannya bersifat *paternalistik*, sedang-kan hubungan di antara kaum birokrat bersifat *hierarkhis*. Hubungan kaum birokrat dengan dengan pembesar Belanda, juga bersifat hierarkhis, sebagai contoh apabila seorang Wedana akan berhubungan dengan penguasa Belanda, maka harus melalui Bupati terlebih dahulu sebagai atasannya dan sebagai birokrat pribumi tertinggi.

Antar kaum birokrat umumnya memiliki hubungan yang bersifat *endogamus*, artinya perkawinan dapat terjadi di antara kaum priyayi sendiri, sehingga kaum priyayi di suatu kota akan mempunyai hubungan kekerabatan dengan kaum birokrat di kota lain.

Kaum priyayi mempunyai ciri-ciri tempat tinggal yang dianggap sangat strategis di masa itu seperti :

- a) tinggal di rumah besar dengan taman yang luas;
- b) berlokasi di sepanjang jalan utama kota;
- c) di belakang rumah besar (milik priyayi) terdapat kelompok-kelompok rumah kecil yang hidupnya sangat tergantung pada priyayi yang bersangkutan sebagai majukannya.

Gambaran munculnya priyayi sebagai seorang birokrat dilengkapi dengan minat yang tinggi terhadap seni sebagai unggulan keraton, seperti : Wayang, kesusasteraan, mistis, dan mitos-mitos tentang benda-benda pusaka (keris; gamelan; makam; dan bangunan-bangunan sakral).

2) ***Munculnya golongan pegawai dengan predikat yang lebih rasional***

Semakin lama Pemerintah Kolonial Hindia Belanda membutuhkan pegawai-pegawai pribumi berpendidikan Belanda, yang dapat mengerjakan beberapa keperluan administrasi pemerintahan. Maka hal ini dijadikan kesempatan bagi orang bumiputra untuk mendapatkan jabatan dan hak yang sama dengan orang Belanda. Keadaan ini menyebabkan kedudukan beberapa pemimpin formal tradisional mulai goyah, bahkan dianggap sudah tidak dapat diandalkan lagi. Sehingga pemerintah kolonial membuka kesempatan belajar di sekolah khusus orang Belanda agar bumi putra dapat mengisi jabatan yang diperlukan, sehingga terlatih dalam berbagai jenis

kegiatan seperti kesehatan, kehutanan, kemiliteran atau kepolisian, dan juga spesialisasi pekerjaan, dengan gaji yang lebih rendah apabila dikerjakan oleh orang Belanda. Dengan demikian, sistem pendidikan umumnya dianggap sebagai alat seleksi dan melatih orang (bumiputra atau anak jajahan) untuk memegang posisi pada lembaga-lembaga yang dipegang pemerintah kolonial. Sistem pendidikan Belanda menjadi sangat penting, karena menunjukkan bahwa pendidikan merupakan kriteria untuk mendapatkan kepangkatan di berbagai kedinasan.

Kesempatan mendapatkan pendidikan bagi bumi putra, pertamakali mendapat sambutan dari para bangsawan dengan alasan agar tetap memegang kekuasaan formal, sehingga kaum bangsawan yang berkedudukan tinggi berusaha menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah khusus Belanda. Dengan harapan mereka tetap menjadi lapisan sosial unggul yang secara tidak langsung jabatan-jabatan dalam administrasi pemerintahan tetap dipegang berdasarkan keturunan. Hal ini lebih rasional, karena mereka memiliki kemampuan yang dibutuhkan.

Walaupun bekerja di bagian administrasi Pemerintahan Kolonial dan memiliki kedudukan serta pangkat yang sama dengan orang Belanda, orang Indonesia sebagai anak jajahan, harus menerima gaji yang lebih rendah dari orang Belanda. Dalam jumlah yang kecil ternyata bumiputra dapat pula menduduki jabatan-jabatan penting, karena yang bersangkutan dianggap telah *diper-Belanda*. Yaitu mereka yang telah mendapat pendidikan tinggi di negeri Belanda, sehingga memiliki gaya hidup seperti orang Belanda, karena mereka mengetahui bahasa dan kebudayaan Belanda.

Keadaan tersebut banyak berpengaruh terhadap pergeseran struktur sosial yang telah ada. Perkembangan ini banyak menciptakan lapangan pekerjaan yang menuntut keragaman keahlian yang lebih rasional. Lapangan pekerjaan ini menciptakan dua kelompok pegawai, yaitu :

- a) *pekerja di belakang meja*. Pekerjaan ini masih dipegang oleh kaum priyayi (birokrat) dengan ketentuan bahwa pangkat atau status boleh tinggi, tetapi sistem upah relatif rendah. Persyaratan untuk memegang jabatan ini hanya didasarkan pada hubungan darah dengan bupati, wedana, atau kedudukan lain yang sederajat;
- b) *pekerja teknis lapangan*. Pekerjaan di lapangan lebih terbuka bagi setiap anggota masyarakat yang bersifat rasional yang berarti menuntut intelegensi yang cukup tinggi; keterampilan; bakat; dan keahlian yang lebih khusus. Melalui persyaratan ini, maka masyarakat Indonesia yang berusia kerja harus siap memasuki pekerjaan sebagai akuntan, teknisi gula, atau perkebunan, ahli mesin, juru gambar, ahli bangunan, keuangan dan kesekertarian. Persyaratan teknis dalam penerimaan pegawai, secara langsung mengancam kedudukan yang eksklusif dari priyayi sebagai kaum birokrat tradisional, sehingga secara sadar ataupun tidak, telah menciptakan situasi yang bertolak belakang dengan menimbulkan prasangka-prasangka yang meliputi :

- kesan keistimewaan budaya tradisional priyayi cenderung menurun;
- pabrik-pabrik dan perusahaan lainnya, yang dipegang oleh penguasa Belanda telah membawa pengaruh yang berarti dalam menciptakan *anti tradisional* dalam struktur sosial desa dan kota;
- kaum elit lama atau priyayi semakin tersaingi dalam kenikmatan material; dan
- golongan priyayi harus mengalami proses perubahan dari kaum literati menjadi kaum intelektual.

4.1.2 Perkembangan Golongan Pasar di masa Pemerintahan Kolonial

Di luar pedagang pribumi ada juga pedagang golongan Timur Asing (Cina, India dan Arab), mereka ini sangat sedikit sekali yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan kolonial. Mereka umumnya sebagai pedagang dengan status dan hak istimewa, terutama kemudahan-kemudahan dalam menjalankan profesi, misalnya, hak monopoli untuk mendatangkan barang-barang yang dibutuhkan orang Belanda dan masyarakat; hak mendirikan sebuah badan usaha berupa pabrik, jasa dan perdagangan. Bagi bumiputra atau pribumi hak istimewa tersebut tidak didapatkan, karena Pemerintah Kolonial menginginkan anak jajahan berada dalam kemiskinan dan kebodohan agar mereka tidak menyadari sebagai orang yang berada di bawah penekanan dan penindasan bangsa lain. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda golongan pedagang ini, terdapat empat golongan yang berpengaruh terhadap budaya pasar termasuk pribumi, yaitu :

- 1) kelompok kecil sebagai pedagang sandang yang relatif mewah, seperti berdagang batik yang telah dikenal oleh bangsa-bangsa di luar Hindia Belanda;
- 2) sekelompok pedagang desa yang semi profesional atau pedagang kota dengan modal yang relatif kecil;
- 3) segolongan pedagang yang sepenuhnya profesional, yang bermula dari pedagang keliling dengan menjajakan kain, barang kelontong, barang dari kulit dan lain-lain; biasanya terdapat kaitannya dengan orang China; dan
- 4) kelompok orang China yang menyediakan hampir seluruh kebutuhan hidup dan dilengkapi dengan barang-barang impor.

Perkembangan selanjutnya dari keempat golongan pasar ini ditandai dengan mengkonsolidasikan ketiga golongan pasar yang disebutkan terdahulu dalam menghadapi kelompok China yang menjadi saingannya, baik dari segi modal usaha maupun dari segi profesional.

4.1.3 Perubahan Struktur Sosial setelah Perang Kemerdekaan

Struktur sosial masyarakat Indonesia sebagai hasil pergeseran nilai akibat perang dunia ke I dan Ke II yang bersamaan dengan perang kemerdekaan. Mereka umumnya tinggal di perkotaan, dengan menempati posisi-posisi sosial tertentu, tetapi adapula yang memang tinggal di pedesaan tanpa da hubungannya dengan kota, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Priyayi Baru*, yaitu kelompok elite sosial, yang telah tercipta oleh perkembangan pekerjaan kepegawaian yang menuntut keahlian teknis, intelegensi, dan bakat. Mereka yang memiliki ciri-ciri :
 - lebih kosmopolitan;
 - telah terlatih dan terampil dalam keahlian tertentu;
 - lebih pragmatis.
- 2) *Golongan Intelektual Islam Reformis*. Kelompok ini muncul sejalan dengan meningkatnya sistem dan perasaan nasionalisme, melalui perkembangan sekolah agama modern, menyebabkan semakin cepatnya kebangkitan kelompok-kelompok sosial pembaharu dalam kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik, tetapi coraknya masih puritan (kolot).
- 3) *Priyayi Lama*. Kelompok ini mewakili sisa birokrat pemerintahan kolonial sebagai pangreh praja sampai sebelum perang kemerdekaan, walaupun demikian kelompok ini masih potensial untuk tetap resisten terhadap pembaharuan sosial budaya dan politik.
- 4) *Golongan Intelektual Islam Konservatif*. Kelompok ini terdiri dari guru- guru pesantren tradisional yang mendapat julukan *Kiayi* atau *ulama*. Kelompok ini masih merupakan penduduk kota dan berdampingan dengan kelompok pengikutnya yang berpendidikan modern.
- 5) *Kelompok masyarakat pedesaan*. Mereka sebenarnya berasal dari wilayah pedesaan yang berada di perkotaan, yang datang baik dengan migrasi, sirkulasi, ataupun komutasi (ulang-alik). Mereka ada juga yang bertempat tinggal dan berusaha di kampung-kampung yang ada di pedesaan, maka disebut sebagai orang kampung yang memiliki mentalitas asli penduduk Indonesia. Kelompok masyarakat ini, di pedesaan sebagai penduduk mayoritas dalam lingkungan sosial-budaya desa.
- 6) *Kelompok masyarakat Pedesaan yang marginal di Jawa*. Kelompok masyarakat ini sebagai penduduk mayoritas kecamatan. Geertz (dalam Suyatno, 1986 : 82) membagi masyarakat Jawa secara *trikotomi* : **santri - abangan - priyayi** kemudian menjadikannya empat kelas sosial, yaitu,
 - a) *Priyayi Santri*, yaitu pegawai kerajaan yang mengurus masalah keagamaan;
 - b) *Priyayi abangan*, pegawai kerajaan yang mengurus masalah lain di luar masalah keagamaan;
 - c) *Wong cilik santri*, mereka yang belajar di pondok-pondok pesantren di bawah ulama/kiai;
 - d) *wong cilik abangan*, secara umum terdapat di desa sebagai pegawai kelurahan atau pegawai rendahan di kota. Mereka dapat pula tidak bekerja sebagai pegawai tetapi bekerja di bidang lain.
- 7) *Kelompok orang yang secara umum terdapat dalam semua lapisan masyarakat pedesaan*, mereka lebih berorientasi kuat pada organisasi

nasionalnya dan masyarakat kota, tetapi masih terbelengu oleh lingkungan desa dengan corak budaya *sinkretisme* atau *ortodoks* apabila dilihat dari segi Islam.

Keragaman struktur sosial yang dijelaskan di atas, secara berangsur-angsur meleburkan diri ke dalam berbagai kelembagaan yang dapat mengintegrasikan dan memberikan kesempatan untuk berafiliasi pada sistem *aliran* dan *solidaritas*. Dasar orientasinya adalah ideologi nasionalisme, dan cita-cita moral yang lebih jauh jangkauannya serta bersifat komprehensif. dari sinilah lahir fraksi-fraksi yang memiliki ciri-ciri :

- Nasionalis
- Agama
- Sosialis

Fraksi-fraksi tersebut diwadahi secara organisatoris dan lebih operasional oleh berbagai *Partai Politik* beserta ormas-ormas sebagai pendukungnya.

4.2 Perkembangan Masyarakat Indonesia

Masyarakat tidak begitu saja muncul seperti sekarang ini, tanpa adanya perkembangan yang dimulai di masa lampau, yang bahkan sampai sekarang mungkin saja terdapat masyarakat yang mewakili masa tersebut. Kemudian masyarakat ini berkembang mengikuti perkembangan jaman, sehingga kemajuan yang dimiliki masyarakat sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi secara global, tetapi ada pula masyarakat yang berkembang tidak seperti mengikuti perubahan jaman melainkan berubah sesuai dengan konsep mereka tentang perubahan itu sendiri. Dalam hal ini Soemardjan (dalam Soekanto, 1984 : 49 -51) mengemukakan beberapa ciri perkembangan masyarakat, sebagai berikut :

1) Masyarakat Sederhana/bersahaja

Memiliki ciri sebagai masyarakat yang mengalami perkembangan lambat dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat lainnya. Adapun ciri-cirinya antara lain :

- a) hubungan dalam keluarga maupun dalam masyarakat sangat erat;
- b) organisasi sosial didasarkan pada adat istiadat yang berbentuk tradisi secara turun temurun;
- c) percaya adanya kekuatan ghaib yang mempengaruhi kehidupan mereka, tetapi mereka sendiri tidak sanggup menghadapi kekuatan tersebut;
- d) tidak terdapat lembaga khusus yang mengatur bidang-bidang pendidikan dalam masyarakat, tetapi keterampilan yang mereka miliki diperoleh melalui pendidikan luar sekolah dari keluarga, maupun masyarakat sendiri secara perlahan-lahan dilakukan secara turun temurun dengan praktek langsung (sedikit atau tanpa teori). Pengetahuan mereka yang didapatkan bukan hasil pemikiran secara empirik maupun hasil eksperimen melainkan hasil pengalaman yang kebenaran secara umum diperoleh secara kebetulan;
- e) tingkat buta huruf tinggi, mengingat tidak adanya pendidikan sekolah yang

- masuk dalam kehidupan mereka;
- f) hukum yang berlaku di masyarakat dapat dipahami dan dimengerti oleh anggotanya yang sudah dewasa;
 - g) kegiatan perekonomian masyarakat sebagian besar di bidang produksi yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau sedikit dipasarkan. harga barang-barang kebutuhan yang dihasilkan masyarakat mempunyai nilai terbatas; dan
 - h) kegiatan perekonomian dan sosial memerlukan kerjasama yang dilakukan oleh orang banyak dan secara tradisional dengan sistem gotong royong, hubungan kerjasama dengan sistem ini tanpa adanya hubungan buruh dengan majikan.

2) **Masyarakat Madya**

Masyarakat ini telah mengalami perkembangan dibandingkan dengan masyarakat sederhana, dengan ciri-ciri antara lain :

- a) hubungan dengan keluarga tetap kuat, tetapi hubungan antar anggota masyarakat sudah mulai mengendur dan mulai didasarkan kepada kepentingan untuk memenuhi untung-rugi atas dasar kepentingan ekonomi;
- b) adat istiadat yang berlaku di masyarakat masih dihormati, dan masyarakat sudah mulai terbuka dengan adanya pengaruh dari luar;
- c) timbulnya pemikiran yang rasional, menyebabkan kepercayaan terhadap kekuatan ghaib sudah mulai berkurang, tetapi kepercayaan akan muncul kembali apabila masyarakat sudah kehabisan akal dalam menghadapi masalah yang terdapat di lingkungannya;
- d) lembaga-lembaga pendidikan mulai muncul dengan adanya pendidikan dasar dan menengah, tetapi belum nampak adanya pendidikan luar sekolah;
- e) karena mulai masuk lembaga pendidikan sekolah, maka tingkat buta huruf bergerak turun;
- f) hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis berdampingan dengan serasi;
- g) ekonomi yang berorientasi pasar mulai menambah persaingan di bidang produksi, hal ini mempengaruhi perbedaan struktur sosial di masyarakat, sehingga nilai uang memegang peranan penting; dan
- h) gotongroyong masih berlaku, tetapi di kalangan keluarga besar atau tetangga-tetangga terdekat, sedangkan pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum sudah didasarkan pada upah. Nilai komersil sudah diperhitungkan.

3) **Masyarakat pramodern-modern**

Masyarakat ini telah mengalami perkembangan atau mengalami kemajuan, karena hubungan dengan masyarakat yang lain telah intensif, bahkan masyarakat ini banyak menerima informasi dari luar melalui media elektronik, bahkan masyarakat yang bersangkutan sering berusaha di luar wilayahnya, sehingga mengalami perkembangan sejalan dengan perubahan-perubahan yang datang dalam kehidupan mereka. Masyarakat pramodern-modern memiliki ciri-ciri antara lain :

- a) hubungan antar masyarakat didasarkan pada kepentingan pribadi dan kebutuhan-kebutuhan individu;
- b) hubungan antar masyarakat dilakukan secara terbuka dalam suasana saling mempengaruhi, kecuali dalam menjaga rahasia hasil penemuan baru;
- c) masyarakat sangat percaya terhadap manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, karena sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan hidup;
- d) masyarakatnya terdiri dari berbagai macam profesi dan keahlian yang dapat ditingkatkan atau dipelajari melalui pendidikan luar sekolah atau pendidikan sekolah kejuruan;
- e) tingkat pendidikan sekolah relatif tinggi dan merata;
- f) hukum yang berlaku di masyarakat adalah hukum tertulis yang sangat kompleks; dan
- g) ekonomi hampir seluruhnya berorientasi kepada pasar yang didasarkan kepada penggunaan uang dan alat pembayaran lain (kartu kredit, check, giro, dan sebagainya).

Pembagian masyarakat seperti di atas didasarkan pada struktur sosial dan kebudayaan yang berlaku di Indonesia, tinggal kita melihat dan memilih masyarakat-masyarakat di suatu daerah sesuai dengan pembagian seperti di atas.

4.2.1 Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang tertutup, padu monolitik. Maksud dari padu monolitik yaitu terdapatnya seperangkat pemikiran dan nilai-nilai dari suatu bidang kehidupan yang meresapi, mengatur, menguasai, menyatukan semua bidang-bidang kebudayaan yang ada. Dalam masyarakat tradisional. interpretasi dan pandangan serta nilai-nilai dari bidang aliran kepercayaan (yang animistis) meresapi, menjelajahi dan mengontrol seluruh kegiatan pengalaman dan pengetahuan yang ada.

Masyarakat tradisional di Indonesia yang sangat memegang teguh adat-istiadat disebut sebagai *Komunitas Adat Terpencil* yang artinya *kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik*. Mereka sebagai masyarakat yang bertempat tinggal tersebar di beberapa tempat sehingga sulit untuk dijangkau oleh berbagai pelayanan, akibatnya secara sosial mereka terbatas berinteraksi dengan masyarakat lainnya, sehingga mereka sebagai masyarakat yang terisolasi oleh alam. Walaupun demikian, adapula masyarakat seperti ini tidak terisolasi oleh alam melainkan budaya mereka yang memiliki tradisi kuat, sehingga secara sengaja memisahkan diri dari kehidupan masyarakat lain yang berada di sekitarnya, sehingga mereka ini tidak terisolasi oleh alam melainkan berusaha agar kehidupan dan budaya mereka tidak banyak dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat lain yang dianggapnya dapat merusak tatanan hidup mereka. Komunitas Adat Terpencil memiliki ciri (dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 06/PEGHUK/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil) sebagai berikut :

- a. **Berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen.** Komunitas Adat Terpencil umumnya hidup dalam kelompok kecil dengan tingkat komunikasi yang terbatas dengan pihak luar. Di samping kelompok komunitas adat terpencil hidup dalam kesatuan suku yang sama dan bersifat tertutup.
- b. **Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan.** Pranata sosial yang ada dan berkembang dalam kehidupan komunitas adat terpencil pada umumnya bertumpu pada hubungan kekerabatan di mana kegiatan mereka sehari-hari masih didasarkan pada hubungan ikatan tali darah dan perkawinan. Pranata sosial yang ada tersebut meliputi antara lain pranata ekonomi, pranata kesehatan, pranata hukum, pranata agama, dan kepercayaan, pranata politik, pranata pendidikan, pranata ilmu pengetahuan, pranata ruang waktu, pranata hubungan sosial, pranata kekerabatan, pranata sistem organisasi sosial.
- c. **Pada umumnya terpencil secara geografis dan sulit dijangkau.** Secara geografis komunitas adat terpencil umumnya berada di daerah pedalaman, hutan, pegunungan, perbukitan, laut, rawa, daerah pantai, yang sulit dijangkau. Kesulitan ini diperkuat oleh terbatasnya sarana dan prasarana transportasi, baik ke ataupun dari kantong wilayah komunitas adat terpencil. Kondisi ini mempengaruhi dan menghambat upaya pemerintah dan pihak luar dalam memberikan pelayanan pembangunan secara efektif dan terpadu.
- d. **Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem.** Aktivitas kegiatan ekonomi warga komunitas adat terpencil sehari-hari hanya sebatas memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri (kebutuhan sehari-hari).
- e. **Peralatan dan teknologinya sederhana.** Dalam upaya memanfaatkan dan mengolah sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik dalam kegiatan pertanian, berburu maupun kegiatan lainnya, komunitas adat terpencil masih menggunakan peralatan yang sederhana yang diwariskan secara turun menurun.
- f. **Ketergantungan kepada lingkungan hidup dan sumberdaya alam setempat relatif tinggi.** Kehidupan komunitas adat terpencil sangat menguntungkan kehidupan kesehariannya baik itu fisik, mental dan spriritual pada lingkungan alam seperti umumnya aktivitas keseharian warga berorientasi pada kondisi alam atau berbagai kejadian dan gejala alam.
- g. **Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.** Sebagai konsekuensi logis dari keterpencilan, akses berbagai pelayanan sosial ekonomi dan politik yang tersedia dilokasi atau sekitar lokasi tidak ada atau sangat terbatas sehingga menyebabkan sulitnya warga komunitas adat terpencil untuk memperolehnya dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya.

Di samping ciri komunitas adat terpencil sebagai masyarakat tradisional, maka berikut ini secara umum tipe dan ciri dari masyarakat tradisional atau disebut ciri masyarakat berkebudayaan pra-industri, antara lain meliputi :

1) **Masyarakat Primitif**

Masyarakat Primitif disebut juga masyarakat sederhana, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya belum mengalami perkembangan yang berarti, bahkan terbatas hanya berhubungan dengan usaha mencari dan menghasilkan bahan makanan atau hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja, sehingga produksi yang mereka hasilkan masih sangat rendah. Masyarakat primitif ini umumnya memiliki mata pencaharian berburu, mengumpulkan bahan makanan, atau menangkap ikan secara terbatas, sehingga hampir tidak ada bahan makanan berlebihan yang merupakan surplus untuk memenuhi masyarakat lain. Dengan demikian, saling ketergantungan dengan kelompok masyarakat lain dalam memenuhi bahan makanan (hampir) tidak terjadi. Kehidupan setiap anggota masyarakat, kadangkala untuk melengkapi kebutuhan bahan makanan dan barang-barang perlengkapan hidup, dengan jalan memelihara binatang dan melakukan produksi dari hasil alam seperti kerajinan, hasil hutan, dll yang sifatnya bukan merupakan produksi yang memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat.

Masyarakat ini terdiri dari beberapa kelompok yang anggotanya terbatas hanya beberapa puluh sampai beberapa ratus orang saja, bertempat tinggal terpencil jauh dari hubungan dengan masyarakat lain. Masyarakat primitif ini sangat jarang berhubungan dengan masyarakat lain, karena umumnya terisolasi oleh keadaan alam, sehingga sulit untuk dijangkau. Mereka secara turun-temurun hampir tidak mengalami perubahan semenjak nenek-moyangnya hingga sekarang ini. Sulitnya menjangkau kehidupan masyarakat primitif, menyebabkan mereka terasing dengan dunia luar, menyebabkan mereka tidak mengenal baca-tulis, sehingga tradisi atau istiadat diturunkan dari mulut ke mulut (melalui pemahaman secara lisan), akibatnya adat istiadat yang asli dapat saja mengalami pengurangan atau penambahan atas dasar penyesuaian kondisi oleh generasi penerusnya. Jumlah anggota kelompok masyarakat yang terbatas dan belum memiliki spesialisasi pekerjaan, sehingga kehidupan mereka homogen dan belum banyak terjadi diferensiasi sosial yang tegas, begitu pula halnya solidaritas masyarakat bersifat solidaritas mekanik di mana setiap anggota masyarakat merupakan bagian-bagian tersendiri yang terlepas dalam pekerjaan masing-masing yang hampir tidak berhubungan dengan pekerjaan dengan anggota masyarakat yang lain. Misalnya dalam gotong-royong merupakan solidaritas mekanik di mana setiap orang yang bekerja tidak bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan karena dianggap sebagai hasil bersama, begitu pula dalam pekerjaan membuat rumah atau kepentingan kelompok secara umum dikerjakan secara gotong royong.

2) **Masyarakat Desa di Daerah Peradaban Lama**

Masyarakat ini lebih berkembang dibandingkan dengan masyarakat primitif, karena mereka telah menempati suatu wilayah tertentu yang tidak terisolasi oleh alam, sehingga masyarakatnya telah berhubungan dengan masyarakat-masyarakat yang lain, tetapi kehidupan masyarakat masih

memegang teguh tradisi atau adat istiadat secara turun-temurun.

Aktivitas kehidupan masyarakat pedesaan di daerah peradaban lama ini, berorientasi pada pertanian. Bahan makanan yang mereka hasilkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan sisanya sebagai kelebihan disimpan atau dijual untuk memenuhi masyarakat lain. Dengan demikian, mereka pertamanya hanya memenuhi kebutuhan sendiri, kemudian apabila terdapat kelebihan maka dijual kepada masyarakat lain, sehingga pertanian yang mereka lakukan tidak berorientasi ekonomi untuk mengejar keuntungan dari produksi yang mereka hasilkan, melainkan semata-mata adanya kelebihan produksi yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Masyarakat pedesaan ini merupakan peralihan dari masyarakat sederhana (primitif) ke masyarakat agraris, diantaranya telah terjadi diferensiasi sosial dan spesialisasi pekerjaan di bidang pertanian, seperti adanya status berdasarkan luasnya lahan pertanian, petani penggarap, buruh tani, pertukangan yang menyediakan alat-alat pertanian, pembagian kerja pertanian, dan lain-lain. Adanya pembagian kerja ini menyebabkan munculnya perbedaan kedudukan di masyarakat.

Masyarakat pedesaan secara umum dapat dikenal dengan adanya dua model, yaitu model konsensus dan model konflik. Dalam hal ini Redfield (dalam Schoorl, 1980 : 102) mengemukakan model konsensus terhadap unsur-unsur di masyarakat, yang meliputi :

- 1) terbatasnya usaha individual untuk memperbaiki nasib sendiri, karena mengutamakan kepentingan kelompok kerabat dan masyarakat desa;
- 2) etik yang sederhana berpusat pada keperluan hidup;
- 3) ikatan yang kuat pada kampung halaman;
- 4) sikap menjunjung tinggi kebiasaan leluhur; dan
- 5) sikap curiga terhadap kehidupan kota, bercampur dengan penghargaan.

Model konflik dikemukakan oleh Foster (dalam Schoorl, 1980 : 102) dengan melihat bahwa masyarakat pedesaan yang memiliki ciri struktural tersendiri menyebabkan adanya rasa curiga dan tidak percaya terhadap segala sesuatu yang datang dari luar, karena dianggap dapat menggoyahkan solidaritas ke dalam. Apabila pengaruh luar masuk dalam kehidupan mereka, maka dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan, terutama yang berhubungan dengan hak milik perorangan dan warisan yang turun temurun. Keadaan tersebut dapat terjadi di antara mereka yang memiliki ikatan sedarah seperti hubungan saudara kandung yang memperebutkan warisan peninggalan orangtuanya. Persaingan lain dapat terjadi pada perayaan pesta pernikahan, khitanan atau pesta-pesta yang melibatkan banyak orang. Pada pesta yang besar akan melambangkan status sosial penyelenggaraannya, tetapi tanpa disadari akan diikuti oleh anggota masyarakat lain untuk menyelenggarakan pesta yang lebih besar lagi, sehingga lambat laun pesta tersebut merupakan persaingan pengakuan status.

Konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pedesaan di antaranya semakin bertambahnya penduduk yang mengakibatkan pemilikan lahan pertanian semakin sempit dan banyaknya pengaruh kehidupan dari luar, yang berasal dari kota. Walaupun demikian, tentu saja masyarakat pedesaan tidak semuanya mengacu pada model konflik, karena pada batas-batas tertentu di Indonesia masih ada kehidupan masyarakat pedesaan yang harmonis dengan solidaritas ke dalam masih kuat.

4.2.2 Masyarakat Transisi

Masyarakat transisi merupakan masyarakat yang berada di antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern, atau masyarakat peralihan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Kehidupan masyarakat ini umumnya berada di wilayah marginal atau pinggiran atau kota-desa, lebih jelasnya secara fisik masih berada di daerah administrasi desa tetapi pengaruh kota terhadap kehidupan sudah nampak. Masyarakat transisi, masih banyak terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan perkembangan masyarakat menuju modern. Tetapi perkembangan masyarakat untuk menuju masyarakat modern kecepatannya tergantung pada masyarakat itu sendiri, karena tergantung pada keinginan untuk berubah dan berkembang dari sebelumnya yang bersifat tradisional.

Kehidupan masyarakat transisi berada di antara tradisional dan modern, yang tentu saja transisi ini tergantung pada beberapa faktor, di antaranya tergantung pada wilayah di mana masyarakat tersebut berada, seperti di pedesaan atau di perkotaan, dengan penjelasan sebagai berikut,

- 1) Apabila masyarakat tersebut berada di pedesaan, maka transisi akan terlihat jelas terutama dalam bidang-bidang kehidupan, misalnya :
 - a) *Pendidikan*. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam kehidupan masyarakat transisi, pendidikan formal yang ada di suatu wilayah hanya sampai tingkat SLTP, atau sekarang ini mungkin saja sampai SMU, pendidikan formal seperti kadangkala dianggap sebagai usaha untuk mencari kerja di luar sektor agraris. Pendidikan formal kemudian ditunjang oleh pendidikan luar sekolah melalui pendidikan keagamaan yang diselenggarakan di tempat-tempat peribadatan terutama dilakukan pada sore hari, dengan tujuan nilai-nilai keagamaan tidak luntur dalam kehidupan masyarakat. Apabila pendidikan formal tidak dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan atau hanya sampai SD saja maka tidak sedikit di antara mereka yang memperdalam pendidikannya melalui pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh pesantren. Pendidikan pesantren seperti ini banyak terdapat di P. Jawa sebagai salah satu upaya untuk memperkuat landasan para santri dalam bidang keagamaan dan kehidupan di masyarakat jika kelak mereka telah menyelesaikannya.
 - b) *Kesehatan*. Di pedesaan telah banyak didirikan Balai kesehatan termasuk Puskesmas dengan tujuan untuk meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat. Yang nampak jelas dalam masyarakat transisi dalam hal kesehatan ini terutama dalam hal ibu-ibu bersalin masih banyak tergantung pada dukun beranak. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya tenaga medik, jauhnya jarak ke Puskesmas terdekat, atau kepercayaan terhadap dukun beranak yang tetap tinggi. Dengan demikian, bahwa kedudukan dukun beranak di masyarakat transisi yang ada di pedesaan menjadi mitra tenaga medik Puskesmas sehingga dukun beranak perlu mendapatkan pengetahuan bersalin secara higienis dan ilmiah agar tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan dapat diperkecil atau dihilangkan. Dalam bidang pengobatan masyarakat transisi masih sangat mengandalkan peranan pengobatan non-medik sebagai upaya meningkatkan derajat sehat, walaupun mereka memerlukan pula tenaga-tenaga medik yang berkeliling ke daerah mereka. Dengan demikian, bahwa pengobatan non-medik bersama-sama dengan pengobatan medik diperlukan dalam kehidupan mereka.

- c) *Industri*. Industri yang berkembang dalam kehidupan masyarakat transisi lebih banyak bersifat industri rumah tangga atau industri kerajinan di mana bahan bakunya berasal dari wilayah sekitarnya. Industri ini dilaksanakan bukan atas dasar keahlian dari para pekerjanya melainkan keterampilan yang diperoleh dari seringnya melakukan jenis pekerjaan yang diberikan kepadanya. Pekerja berasal dari keluarga pemilik industri itu sendiri atau tetangga sekitar industri itu berada.
 - d) *Komunikasi dan informasi*. Komunikasi yang dilakukan masyarakat tidak atas kepentingan ekonomi, tetapi adakalanya atas dasar kekeluargaan di mana saling berkunjung hanya sekedar bercengkrama masih dilakukan warga masyarakat, sedangkan untuk kepentingan ekonomi dilakukan apabila berhubungan dengan awal musim tanam atau panen hasil bumi, sampai pada jual beli hasil bumi, jual beli tanah, dan kepentingan untuk mengangkut hasil bumi. Informasi pembangunan yang datang pada mereka berasal dari perangkat desa, dan jarang informasi diperoleh dari media massa karena karena koran, tabloid, majalah, jurnal dan lain-lain sedikit sekali atau tidak pernah di antara mereka yang berlangganan, walaupun ada waktu penerbitannya telah terlewat. Begitupula informasi dari televisi jarang diperoleh, di samping saluran televisi yang terbatas juga acara yang mereka tonton terbatas pada hiburannya saja, sedangkan berita dan informasi lain sering diabaikan.
- 2) Apabila masyarakat transisi ini berada di pinggiran kota. Masyarakat transisi yang bertempat tinggal di pinggiran kota kadangkala sikap modern tidak secara utuh berkembang dalam kehidupan mereka, karena secara fisik dan budaya mereka mendapat pengaruh kota tetapi secara mental dan administrasi berada di desa. Dalam beberapa bidang kehidupan, masyarakat transisi umumnya kalah bersaing dengan masyarakat kota, apalagi oleh perkembangan kota sendiri yang turut menggeser kehidupan mereka

menjadi lebih terpinggirkan. Kehidupan masyarakat transisi di pinggiran kota dapat diketahui dari beberapa aspek, antara lain :

- a) *Pendidikan*. Beberapa orang sudah banyak yang berhasil dalam bidang pendidikan, terutama setelah mereka menamatkan tingkat kesarjaannya. Tetapi di lain pihak banyak pula yang menjadi pedagang di kota ataupun pengemudi ojek di wilayahnya.
- b) *Perubahan fungsi lahan*. Sebagian wilayah pinggiran kota masih berorientasi di bidang agraris terutama pertanian yang banyak dilakukan oleh mereka yang berusia tua, sedangkan pemuda nampaknya sudah tidak tertarik lagi di bidang pertanian dan mereka berusaha bekerja di bidang lain. Perkembangan kota di wilayah mereka ini sedikitnya akan menggeser fungsi lahan dari pertanian ke industri ataupun menjadi perumahan baru.
- c) *Mata pencaharian*. Ketidak tertarikan pemuda di bidang agraris dan adanya perubahan fungsi lahan menyebabkan masyarakat di pinggiran kota sebagai masyarakat transisi berusaha mencari kehidupan di bidang lain, bagi mereka yang mampu dan memiliki modal untuk mengembangkan usaha, biasanya akan menyewakan kamar, rumah, ataupun mendirikan warung nasi untuk pekerja industri di wilayahnya. Berdirinya industri di wilayah mereka, menyebabkan adanya persaingan untuk menjadi pekerja dengan masyarakat yang berasal dari daerah-daerah lain, tetapi tidak sedikit di antara mereka yang tidak dapat diterima dengan alasan latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, akibatnya mereka kalah bersaing sehingga tersingkir dari kehidupan menjadi pekerja industri.
- d) *Konflik*. Adanya perumahan baru yang diisi oleh mereka yang bekerja di kota, komplek perumahan tersebut terpisah dengan pemukiman warga masyarakat sekitarnya oleh benteng yang kokoh dan tinggi, apalagi kehidupan masyarakat setempat berada di bawah masyarakat pemukiman baru, di tambah lagi sarana umum seperti jalan yang masuk ke pemukiman masyarakat setempat ditutup akibatnya masyarakat untuk menuju tempat atau jalan terdekat harus mengelilingi pemukiman baru yang jaraknya relatif jauh. Keadaan ini akan menyebabkan terjadinya konflik dengan pengembang perumahan ataupun dengan penduduk pemukiman baru, yang menyebabkan terjadinya permusuhan antar dua pemukiman. Konflik dapat pula terjadi antara masyarakat setempat dengan industri yang ada di lingkungan mereka, baik yang disebabkan kebisingan, pencemaran lingkungan, rusaknya jalan hasil masyarakat, air sumur menjadi berkurang dan kering dimusim kemarau akibat air tanah permukaan tersedot oleh kebutuhan industri, maupun tidak dapatnya mereka bekerja di industri tersebut. Konflik masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi industri seringkali terjadi dan tidak jarang terjadi pengrusakan terhadap bangunan industri.
- e) *Pengaruh kota*. Mereka yang berada di pinggiran kota sudah mulai

meninggalkan sikap dan sifat tradisionalnya kemudian beralih menjadi masyarakat kota yang modern. Tetapi perubahan ini tidak selamanya sesuai dengan yang diinginkan terutama hal-hal yang bersifat positif seperti ciri dari masyarakat modern. Keinginan untuk menjadi masyarakat modern menjadi terlalu dipaksakan malah terjebak pada sikap weternisasi, karena kurangnya pengetahuan dari pengertian modern itu sendiri.

- 3) Masyarakat transisi yang berada di perkotaan. Masyarakat kota tidak selamanya sebagai masyarakat modern apalagi seperti Indonesia di mana kota-kotanya tumbuh dan berkembang tidak lepas dari adanya urbanisasi dan lambatnya proses adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Berikut ini, beberapa faktor yang menunjukkan terdapatnya masyarakat transisi di perkotaan,
 - a) *Urbanisasi*. Banyaknya urbanisasi yang berasal dari pedesaan menyebabkan penduduk kota semakin bertambah besar, apalagi tidak semua pendatang dapat menempati kedudukan yang layak di perkotaan, sehingga mereka yang tidak dapat atau kalah bersaing di perkotaan akan terpinggirkan menjadi pemulung, pengemis, pelacur, gelandangan, bahkan menjadi penjahat, sedangkan yang agak beruntung akan menempati sektor informal seperti pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang warung nasi (warung tegal), dan lain-lain. Mereka ini hidup dan menjadi masyarakat perkotaan, tetapi banyak yang masih membawa sifat dan sikap (mentalitas) tradisional sebagaimana di bawa dari daerah asal.
 - b) *Mentalitas*. Mentalitas sebagai masyarakat transisi bagi mereka yang berada di perkotaan sebagai pendatang, tidak akan secara langsung menjadi masyarakat modern melainkan memerlukan proses yang kecepatannya tergantung pada mereka sendiri untuk cepat berubah dan menyesuaikan diri menjadi masyarakat modern. Perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern bagi masyarakat pendatang di perkotaan menjadi sangat lambat, apabila mereka bertempat tinggal, bergaul, dan berusaha bersama-sama dengan yang memiliki mentalitas sama.
 - c) *Pengaruh pedesaan*. Para pendatang di perkotaan (urbanisasi) tidak akan begitu saja meninggalkan mentalitas tradisionalnya, apabila yang bersangkutan secara langsung berasal dari pedesaan, apalagi seringkali mereka pulang-pergi ke pedesaan yang tradisional, maka pengaruh pedesaan akan tetap melekat dalam diri mereka. Dengan demikian, pengaruh desa tradisional dengan pengaruh kota yang modern sama-sama diterima dalam kehidupan.

Kehidupan masyarakat transisi ini, akan selalu dijumpai pada masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, apalagi untuk mencapai hidup yang layak sulit untuk dijangkau, maka tidak

jarang cara berfikir rasional dan non-rasional bersama-sama berjalan dalam kehidupan mereka

4.2.3. Masyarakat Modern

Kehidupan modern tidak selalu berada di kota saja melainkan kehidupan pedesaanpun dapat disebut modern, asalkan sikap mental masyarakat yang terdapat di wilayah desa tersebut tidak lagi bersifat tradisional, tetapi memiliki ciri sebagai masyarakat modern. Masyarakat modern muncul tidak dengan sendirinya melainkan adanya perubahan dalam masyarakat itu sendiri, dengan ciri-ciri sebagai berikut,

- 1) Perubahan sikap dari yang bersifat tradisional menjadi lebih modern dengan jalan melepaskan diri dari cara berfikir dan berperasaan tradisional yang telah tertanam di masyarakat dalam jangka waktu yang lama, seakan-akan mereka telah meninggalkan prinsip hidup dan nilai-nilai tradisional yang dianutnya. Hal ini terjadi pada masyarakat tradisional atau masyarakat yang memegang teguh tradisi, seperti masyarakat Baduy di Banten selatan atau masyarakat pedesaan umumnya.
- 2) Sifat seseorang menjadi modern sering tidak nampak sebagai ciri yang netral, tetapi lebih nampak seperti perilaku orang Eropa atau Amerika Serikat dalam hal-hal tertentu, seperti cenderung terhadap hal-hal yang rasional, giat bekerja, tidak percaya hal-hal yang tidak masuk akal dan lain-lain. Ciri sebagai orang Eropa atau Amerika Serikat jangan ditafsirkan sebagai *westernisasi* yang lebih menitik beratkan pada peniruan dan gaya yang tidak sesuai dengan sistem nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Perubahan menjadi modern datang dari dirinya dengan berperilaku dan berbuat sesuai dengan kemodernnya.
- 3) Kebanyakan ciri yang disebut modern kadangkala dipaksakan walaupun tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat, sehingga dapat memunculkan *westernisasi* maka perlu hati-hati dalam melihat ciri modern atau peniruan karena ingin disebut modern. Perubahan perilaku bukannya menjadi manusia modern melainkan meniru pakaian kelompok pemain musik, bintang film, penyanyi, dan lain-lain, bahkan meniru perilaku negatif dari kehidupan masyarakat yang ada di Eropa atau di Amerika Serikat.

Perubahan perilaku menjadi masyarakat modern dalam pembangunan sangatlah diharapkan, karena adanya kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan sesuai dengan keahlian masing-masing. Ciri-ciri masyarakat modern seperti di atas merupakan ciri yang berlaku umum di manapun masyarakat berada, dengan melihat struktur masyarakat dan kebudayaannya. Walaupun demikian, bahwa untuk melihat modernnya suatu masyarakat kadangkala diukur dari keberhasilan dalam bidang ekonomi, seperti halnya Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang perlu dilihat dari tingkat pembangunan ekonomi dan tingkat hidup masyarakatnya yang layak, apakah telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan ? Dengan demikian, bahwa pembangunan ekonomi dan taraf hidup yang layak hanyalah sebagai salah satu

faktor saja, tetapi perubahan watakpun dari yang tradisional menuju yang lebih maju dapat juga dianggap sebagai faktor terbentuknya masyarakat modern, karena perubahan watak masyarakat seperti ini sangat diperlukan dalam pembangunan menyeluruh. Akhirnya timbul pertanyaan bagaimana mengukur seseorang sebagai bagian dari masyarakat modern ? dalam hal ini Inkeles (1977 : 86 – 98) mengemukakan beberapa faktor, antara lain,

- 1) *Pendidikan*. Melalui pendidikan dapat diketahui tingkat keterbukaan seseorang akan hal-hal yang baru, karena pendidikan merupakan jalan pembuka kehidupan yang diperlukan oleh seseorang untuk meningkatkan taraf hidupnya, sehingga semakin bertambah tingkat pendidikan seseorang maka menunjukkan tingkat ke-modern-nannya akan semakin meningkat pula.
- 2) *Urbanisasi*. Tumbuhnya kota yang disebabkan oleh banyaknya pendatang, terutama yang berasal dari daerah pedesaan akan menumbuhkan sikap modern pada mereka.
- 3) *Komunikasi*. Informasi yang dapat menumbuhkan sikap dan keinginan untuk berubah, banyak yang berasal dari media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, jurnal, dan lain-lain.
- 4) *Politik*. Di dalamnya termasuk negara nasional. Peralatan pemerintah dengan birokrasinya, sistem kepartaian, dan satuan militer. Suatu negara sekarang ini tidak dapat diatur secara tradisional melainkan dengan cara yang teratur atas dasar organisasi modern, sehingga jelas azas dan tujuan negara yang bersangkutan.
- 5) *Industrialisasi*. Merupakan modernisasi pabrik dan administrasi industri. Pabrik/industri merupakan tempat pembuatan produk yang akan disebarkan ke berbagai tempat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk harus selalu melakukan penelitian dan pengembangan produk itu sendiri, di samping meningkatkan sumberdaya manusia yang terlibat di dalamnya.

Lima faktor munculnya modernisasi seperti di atas dapat digunakan untuk mengukur tingkat modernnya masyarakat secara kualitatif, tetapi lima faktor tersebut bukan merupakan faktor yang mutlak, melainkan hanya sebagai dasar saja. Mungkin saja di antara pembaca ada yang dapat atau menemukan faktor lain, sehingga dapat dimasukkan untuk mengukur tingkat modernnya masyarakat baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

Apabila terdapat ukuran untuk menentukan tingkat modernnya suatu masyarakat, maka berikut ini Soekanto (1984 : 61) mengemukakan ciri masyarakat atau manusia modern, sebagai berikut :

- 1) Manusia modern adalah orang yang bersikap terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru maupun penemuan baru. Intinya : tidak ada sikap pariori atau prasangka.
- 2) Manusia modern senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan, setelah dia menilai kekurangan-kekurangan yang dihadapi pada saat itu.

- 3) Manusia modern mempunyai kepekaan terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya, dan mempunyai kesadaran bahwa masalah-masalah tersebut berkaitan dengan dirinya.
- 4) Manusia modern senantiasa mempunyai informasi yang lengkap mengenai pendiriannya.
- 5) Manusia modern lebih banyak berorientasi ke masa kini dan mendatang (merupakan suatu "squence").
- 6) Manusia modern senantiasa harus menyadari potensi-potensi yang ada pada dirinya, dan yakin bahwa potensi tersebut akan dapat dikembangkannya.
- 7) Manusia modern adalah manusia yang berpegang pada perencanaan.
- 8) Manusia modern tidak pasrah pada nasib.
- 9) Manusia modern percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
- 10) Manusia modern menyadari dan menghormati hak-hak, kewajiban-kewajiban serta kehormatan pihak lain.

Ciri manusia atau masyarakat modern seperti di atas merupakan wujud kongkrit untuk menilai dan mengukur tingkat modernnya seseorang yang ada dalam masyarakat.

Menuju masyarakat modern tidak begitu saja berjalan sesuai dengan rencana yang diinginkan, tetapi adakalanya terdapat hambatan dari dalam masyarakat itu sendiri baik secara sadar atau tidak, bahwa mentalitasnya memperlambat jalan untuk terjadi perubahan menjadi masyarakat modern. Berikut ini Soekanto (1984 : 61-62) memberikan faktor-faktor penghambat terjadinya masyarakat modern, antara lain :

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain("tepa slira");
- 2) Tingkat aspirasi yang rendah;
- 3) Kegairahan yang kurang untuk menguasai masa depan;
- 4) Ketidakmampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan; dan
- 5) Tidak mempunyai daya kreasi dan inovasi.

Halangan tersebut segera diatasi agar jangan sampai mengganggu atau menghambat pembangunan yang sedang dijalankan masyarakat atau pemerintah.

4.3 Modernisasi

Banyak berbagai disiplin ilmu yang memberikan definisi tentang modernisasi, tetapi satu sama lain masing-masing memiliki penekanan yang berbeda berbeda, walaupun semuanya mengemukakan tentang adanya perubahan yang mengarah pada efektifitas dan efisiensi suatu tindakan, perilaku, adanya penyesuaian terhadap perkembangan, ataupun pekerjaan dan hasilnya. Sebagaimana intinya dikemukakan oleh Weiner (dalam Sayogyo, 1985 : 15), yaitu,

- a. Para ahli ekonomi memandang modernisasi terutama dalam pengertian

- “penerapan teknologi” oleh manusia untuk menguasai sumber-sumber alam demi menciptakan peningkatan nyata dalam pertumbuhan hasil penduduk perkapita.
- b. Para ahli sosiologi dan antropologi sosial terutama berurusan dengan “proses differensiasi” yang menandai semua masyarakat modern. Dalam hal ini, mereka mengamati bermacam-macam differensiasi yang terjadi di tengah-tengah pelbagai tatanan/struktur masyarakat, begitu pekerjaan baru muncul, begitu lembaga pendidikan yang rumit dan baru berkembang serta berbagai jenis komunitas baru tampil.
 - c. Kalangan sarjana politik membahas serangkaian hal-hal yang menghambat dalam modernisasi tetapi memusatkan perhatian terutama pada masalah “pembinaan negara dan pemerintahan” begitu modernisasi berlangsung. Mereka mempertimbangkan cara-cara kalangan “elite” pemerintahan menanggapi usaha-usaha mereka yang baru terjun ke dalam dunia politik untuk memperoleh kekuasaan dan untuk melakukan tuntutan kepada mereka yang memegang kekuasaan.

Pengertian modernisasi menunjukkan sifat masyarakat secara umum yang dilandasi oleh sifat modern individu, karena dari individulah tumbuh modernisasi.

Indonesia negara yang sedang berkembang dapat dilihat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita agar dapat diketahui tingkat kemajuannya sebagaimana ditunjukkan oleh Rostow. Begitupula bahwa suatu negara modern muncul dan berkembang tidak perlu meninggalkan nilai-nilai tradisional, karena nilai tradisional tersebut dapat menjadi landasan yang kuat dalam mencapai tingkat modern yang tinggi seperti yang dilakukan oleh Jepang, hanya tinggal Indonesia dalam menuju modernisasi masih memerlukan nilai tradisional yang berlaku di masyarakat ? untuk mendapat penjelasannya perlu disimak uraian berikut ini,

4.3.1. *Pertumbuhan Ekonomi*

Pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai salah satu indikator dalam menentukan kemajuan atau tingkat modernnya suatu negara yang bersangkutan, seperti halnya Indonesia pernah mencanangkan pertumbuhan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai tahap tinggal landas, tetapi hal itu nampaknya sebagai suatu cita-cita yang belum dapat tercapai. Walaupun demikian, nampaknya usaha ke arah itu harus tetap dilaksanakan, tetapi menjadi suatu pertanyaan, “kapan?”. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dikemukakan oleh Rostow, yang mengemukakan lima tahapan pembangunan ekonomi sebagai dasar untuk menentukan keadaan modernnya suatu negara dari tingkat masyarakat tradisional ke tingkat masyarakat yang memiliki konsumsi masanya tinggi. Tetapi yang paling penting bahwa kemajuan suatu negara dapat diketahui apabila negara yang bersangkutan telah berada pada tahap tinggal landas, tahap ini merupakan tahap paling yang paling kritis dalam mencapai kedudukan sebagai negara maju. Dengan demikian ukuran relatif kemajuan dan pembangunan yang telah dicapai dapat diketahui dari tahapan pertumbuhan ekonomi, seperti yang diuraikan berikut ini :

- 1) *Tahapan masyarakat tradisional* (The tradisional society)

Pada tahap ini tingkat perekonomian suatu negara masih tergantung pada pertanian, dengan ciri-ciri antara lain,

- harapan masa depan sangat suram,
- tidak ada pemikiran atau kemajuan untuk kemajuan,
- pengetahuan teknik masyarakat masih rendah,
- tidak ada pembagian kerja yang jelas,
- produktivitas rendah, dan
- tidak ada usaha untuk menaklukkan alam.

2) *Tahap peralihan masyarakat* (The pre-conditions for the take off)

Masyarakat mulai menggunakan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan sektor agraris dan industri. Pada tahap ini negara yang memiliki ciri-ciri peralihan masyarakat antara lain,

- pendidikan mulai dihargai,
- lembaga perekonomian mulai diterima masyarakat,
- cara produksi mulai dilakukan secara mekanisasi,
- pembagian kerja secara rasional muncul,
- terjadinya peningkatan produktivitas pertanian dan industri, dan
- menanamkan gemar menabung terhadap masyarakat, sebagai bagian dari investasi.

Stratifikasi sosial mulai beragam dengan munculnya para pemimpin masyarakat yang berasal dari golongan yang memiliki kekayaan dan pendidikan memadai, begitupula kesempatan pendidikan bagi warga masyarakat lain mulai terbuka. Kebijakan pemerintah di bidang pembangunan mulai diorganisir dengan sistem sentralisasi.

3) *Tahap masyarakat tinggal landas* (take off)

Perkembangan negara berada pada tahap kritis dan menentukan guna mencapai perekonomian yang berdiri sendiri. Pada tahap ini diibaratkan posisi duduk seseorang yang berada dalam pesawat terbang. Pesawat terbang pada mulanya diam di landasan, kemudian bergerak perlahan di landasan akhirnya terbang lepas landas ke angkasa. Adapun ciri-ciri negara yang berada pada tahap lepas landas, antara lain :

- pada tahap ini negara mulai disebut sebagai negara modern dengan penambahan fasilitas umum seperti pembangunan jalan raya, rumah sakit, pengairan, dan teknologi pertanian dikembangkan,
- tabungan atau investasi negara berada sekitar 10 % dari national/regional income (pendapatan percapita),
- muncul industri-industri baru yang sebelumnya tidak ada, baik melalui PMDN maupun PMA. Perubahan ini membawa pengaruh dengan cepat terhadap aktivitas masyarakat yang tadinya berorientasi pada sektor agraris, sekarang mulai mengalami perubahan ke sektor non-agraris seperti industri dan jasa.
- Pendapatan perkapita (GNP) mengalami peningkatan secara mantap tanpa adanya gangguan inflasi dan devaluasi,

- Pengangguran ditekan seminimal mungkin dengan banyaknya industri padat karya.

Perubahan yang terjadi pada saat tinggal landas jangan sampai mengorbankan budaya bangsa melalui peniruan (imitasi) yang belum tentu dapat menunjang kepribadian bangsa. Karena itu, perlu diperhatikan faktor agama, jumlah dan susunan penduduk, perkembangan mental, adat istiadat, struktur ekonomi dan sosial agar identitas bangsa dengan budayanya tidak hilang oleh kemajuan jaman, di samping itu bahwa pembangunan juga mempersiapkan perekonomian yang mandiri.

4) *Tahap masyarakat yang mandiri (The drive to maturity)*

Perkembangan perekonomian suatu negara melalui sektor produksi digunakan secara penuh. Negara yang memiliki ciri-ciri tahap ini antara lain,

- investasi negara sebesar 15% - 20% dari pendapatan nasionalnya,
- semua bidang kehidupan menggunakan metode yang mutakhir,
- pendapatan perkapita mengalami kenaikan yang pesat,
- industri dasar mengalami perkembangan yang cukup tinggi, seperti industri kimia dasar, industri peralatan, industri elektronika, dll.
- teknologi semakin mutakhir (modern).

5) *Tahap konsumsi massa tingkat tinggi (The high mass consumption)*

Pada tahap ini terjadi perubahan struktur ekonomi dari industri ke industri yang lebih bersifat jasa. Pendapatan perkapita regional mencapai puncaknya, sehingga konsumen yang dilayani di wilayah ini mendapat kepuasan. Negara atau wilayah yang berada pada tahap ini memiliki ciri-ciri, antara lain,

- kebutuhan masyarakat dipuaskan setinggi-tingginya,
- produksi barang dan jasa mencari konsumen,
- konsumen benar-benar dilayani sebagai raja, dan
- perang iklan terjadi di mana-mana dengan tujuan menarik konsumen sebesar-besarnya.

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari pertumbuhan ekonomi suatu negara, sehingga negara berusaha mencari hubungan dengan negara lain yang berada di bawahnya agar negara bersangkutan terjadi ketergantungan ekonomi. Negara yang berada pada tahap akhir ini sering menentukan perekonomian negara lain.

4.3.2. Budaya Lokal dan Pembangunan

Indonesia dengan beraneka-ragamnya suku-bangsa yang tersebar di seluruh Nusantara menyebabkan masing-masing suku-suku bangsa memiliki budaya yang berbeda dengan suku-bangsa lainnya. Kebudayaan suku-bangsa sebagai suatu tradisi yang memperkaya kebudayaan nasional yang juga sebagai sumberdaya pembangunan. Kebudayaan setiap suku-bangsa yang berada di setiap daerah dapat kita sebut sebagai budaya lokal, yang di antaranya bersifat tradisional. Kebudayaan lokal yang bersifat tradisional selama krisis ekonomi

sejak tahun 1997 ternyata mampu bertahan dan membangun dirinya sendiri sejalan proses perubahan ekonomi berdasarkan nilai yang dianut, sehingga nilai-nilai budaya tradisional ini dapat dijadikan masukan dalam proses pembangunan nasional. Dengan demikian bahwa sifat tradisional tidak selalu ketinggalan jaman atau harus dihindari melainkan harus dicari nilai-nilai yang mendukung pembangunan, sehingga nilai-nilai tradisional ini tidak selalu bertentangan dengan nilai-nilai modern.

Diangkatnya nilai-nilai tradisional dalam mendukung pembangunan di Indonesia telah diteliti oleh Michael R. Dove terhadap masyarakat Bima di Sumbawa dan masyarakat Punan di Kalimantan. Penelitiannya menitik beratkan pada kajian antropologis dengan memunculkan pendapat bahwa pembangunan harus melihat dan mengambil nilai-nilai tradisional yang dianut masyarakat. Karena itu, pembangunan nasional harus berakar dari budaya tradisional, sebagaimana Suwarsono dan Alvin (1991 : 66) kemukakan sebagai berikut,

Dove dengan tidak ragu-ragu menyatakan bahwa tradisional tidak harus terbelakang. Baginya budaya tradisional sangat dan selalu terkait dengan proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik dari masyarakat pada tempat mana budaya tradisional tersebut melekat. Jika demikian halnya bagi Dove, budaya tradisional selalu mengalami selalu mengalami perubahan yang dinamis dan oleh karena itu budaya tradisional tidak mengganggu proses pembangunan.

Sangat salah sekali apabila menganggap dan melihat budaya tradisional sebagai tanda keterbelakangan dan penghambat pembangunan. kesalahan pandangan terhadap budaya tradisional tersebut disebabkan oleh Ketidacermatan atau pemegang kebijakan dalam menggali kebudayaan daerah. akibatnya bahwa unsur-unsur pembangunan yang berasal dari luar dianggap paling baik, padahal belum tentu cocok diterapkan di Indonesia. Karena itu, pembangunan akan lebih berhasil jika melihat nilai-nilai tradisional yang dimanfaatkan untuk proses pembangunan, sehingga kebutuhan dan kepentingan masyarakat dapat diperhatikan tanpa mengubah atau merusak nilai-nilai yang berlaku.

Laporan Dove mengenai kajian budaya tradisional dengan pembangunan Indonesia, dikategorikan menjadi empat kelompok, yaitu agama tradisional, ekonomi, lingkungan hidup, dan perubahan sosial, dengan penjelasan sebagai berikut :

1) *Agama Tradisional*

Agama tradisional disebut juga religi yang tertanam dan diyakini dan ada dalam kehidupan masyarakat. Hubungannya dengan pembangunan agama tradisional ini dikemukakan oleh Dove (dalam Suwarsono dan Alvin, 1991 : 67) yaitu, *Sistem kepercayaan tradisional Indonesia ini memiliki bobot yang cukup untuk disebut agama dan secara empiris, sistem kepercayaan tradisional ini mengandung sistem tentang dunia yang valid.* Sistem kepercayaan yang hidup di antara beberapa dalam masyarakat Indonesia bersumber dari warisan nenek moyang yang disebut *aliran kepercayaan*, walaupun tidak dapat disebut sebagai agama wahyu melainkan agama

budaya, tetapi secara turun temurun di dalam ajarannya telah memberikan pemahaman mengenai tradisi, adat istiadat, dan pengetahuan.

2) *Ekonomi*

Dalam hal ekonomi Suwarsono dan Alvin (1991 : 68) mengemukakan,

Sikap negatif pemerintah Indonesia tidak hanya terlihat pada pandangan tentang kepercayaan tradisional, tetapi juga pada penilaiannya terhadap sistem ekonomi tradisional, seperti misalnya yang disebut dengan pertanian ladang, usaha mengumpulkan sagu, dan usaha bertani bertani berpindah-pindah.

Usaha tradisional dianggap pemerintah Indonesia sebagai usaha yang tidak efisien, karena tidak mendukung proses modernisasi. Padahal kenyataan yang ada, bahwa masyarakat tradisional senantiasa mempertahankan hidupnya melalui pengolahan lingkungan secara bijaksana sehingga tidak terjadi kerusakan.

Perekonomian yang dilakukan masyarakat tradisional memberikan manfaat fungsional, selain hasil bumi yang dapat ditukarkan atau dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak didapatkan di daerahnya, juga lingkungan alam tetap terjaga, sehingga terus memberikan kehidupan.

3) *Lingkungan Hidup*

Budaya tradisional memiliki peran positif dalam menjaga lingkungan hidup. Masyarakat tradisional selalu menjaga lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai kepercayaan yang mereka anut, di mana setiap perilaku yang dapat merusak lingkungan selalu dihubungkan dengan akibat yang akan muncul terhadap mereka, seperti marahnya penunggu hutan, atau akan terjadi bencana, sehingga melalui kepercayaan ini masyarakat akan takut apabila mengganggu atau merusak lingkungan.

Nilai-nilai tradisional yang dihubungkan dengan kepercayaan masyarakat ternyata tidak diperhatikan secara serius oleh pemerintah, akibatnya seperti di luar P. Jawa seperti di P. Sumatera, P. Kalimantan, P. Sulawesi dan pulau-pulau lainnya banyak terjadi kerusakan hutan. Pemerintah banyak memberikan hak pengusahaan hutan pada swasta untuk diambil kayunya. Akibatnya sampai sekarang masih terus berlangsung penggundulan dan kebakaran hutan oleh pengusaha, apalagi terjadi pula ketidak seimbangan antara penebangan kayu dengan penanaman kembali, sehingga setiap tahun ratusan hektar hutan di Indonesia hilang.

Masyarakat tradisional walaupun bertani secara berpindah dengan jalan membuka hutan, walaupun dibakar tetapi tidak menimbulkan kebakaran hutan yang hebat, karena mereka membuka hutan terbatas sesuai dengan banyaknya anggota keluarga dan kemampuannya.

4) *Budaya Tradisional dan Perubahan Sosial*

Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tradisional di Indonesia lebih banyak tergantung pada konsep mereka untuk berubah,

sehingga perubahan yang terjadi disesuaikan dengan kondisi dan kepentingannya, baik secara internal maupun eksternal.

Perubahan yang dilakukan terhadap masyarakat di antaranya dengan cara memperbaiki pertanian tradisional, agar banyak warga masyarakat petani tersebut turut terhadap program pemerintah, tetapi nampaknya perubahan cara bertani tradisional ini tidak akan seluruhnya mengalami perubahan, karena dalam hal-hal tertentu akan tetap bertahan, misalnya : Pemilihan bibit unggul dan pengolahan tanah mengalami perubahan, tetapi kepercayaan terhadap tanah pertanian maupun saat akan melakukan panen, masyarakat masih tetap melakukan penghormatan terhadap leluhurnya. Setelah panen selesai umumnya merupakan saat-saat diadakannya berbagai pesta seperti, perkawinan, khitanan, bahkan pembelian barang-barang yang bersifat konsumtif, sehingga hal ini memerlukan perubahan agar masyarakat berhemat dengan hasil pertaniannya, karena hasil panen yang didapat sebaiknya digunakan untuk menghadapi musim panen yang akan datang, sehingga jangan sampai terjadi kekurangan di saat musim paceklik, seperti banyaknya barang yang dibeli di saat panen kemudian akan dijual di saat paceklik.

Hasil penelitian Dove menunjukkan bahwa budaya tradisional tidak harus ditafsirkan sebagai faktor penghambat pembangunan atau modernisasi. Bahkan dalam batas-batas tertentu budaya tradisional dapat berperan positif untuk mendorong terjadinya laju modernisasi di dalam kehidupan masyarakat.
